

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak kasus gizi buruk pada anak balita di Indonesia menunjukkan masalah gizi yang serius. Balita pendek juga dikenal sebagai penuaan disebabkan oleh kekurangan gizi yang berkelanjutan yang menyebabkan gagal tumbuh pada tubuh dan otak. Akibatnya anak tersebut tumbuh lebih lambat dari anak seusianya dan memiliki keterlambatan dalam pemikiran. Stunting yaitu salah satu masalah kesehatan cukup serius di Indonesia, terutama pada anak balita. Stunting yaitu kondisi dimana pertumbuhan tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama. Dampak dari stunting yaitu bukan hanya mempengaruhi perkembangan fisik, akan tetapi juga kemampuan kognitif anak yang dapat mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia di masa depan.

Status gizi anak balita merupakan indikator penting keberhasilan pencapaian tujuan kesehatan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Masa balita sangat rentan terhadap masalah gizi termasuk stunting. Stunting juga dikenal sebagai kondisi anak kerdil yaitu gangguan tumbuh kembang yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi jangka panjang yang terjadi sejak kehamilan hingga usia dua tahun terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan. Pola asuh yang buruk, asupan yang tidak memadai dan kurangnya perhatian terhadap kesehatan ibu selama kehamilan adalah beberapa penyebab utama stunting. Berdasarkan standar WHO Anthro 2005, nilai z-score TB/U seorang anak kurang dari -2 SD dianggap stunting. Stunting memiliki banyak konsekuensi serius, bukan hanya masalah fisik seperti tubuh yang terlalu pendek dibandingkan usia. Anak-anak yang stunting cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah lebih rentan terkena penyakit dan beresiko kehilangan produktivitas di masa depan. Dalam jangka panjang tingginya angka stunting dapat menghambat

pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan kemiskinan meningkat. Rudmini, (2021)

Masalah ini menjadi perhatian serius di negara berkembang termasuk Indonesia, karena dampaknya yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia. Menurut UNICEF sekitar 7,8 juta anak di Indonesia menderita stunting menjadikan Indonesia salah satu dari lima negara dengan jumlah kasus stunting tertinggi di dunia. Kondisi ini berakibat pada terganggunya pertumbuhan fisik, penurunan perkembangan kognitif, berkurangnya produktivitas di masa depan, serta peningkatan risiko penyakit kronis. Penyebab utama stunting meliputi kekurangan asupan nutrisi selama 1.000 hari pertama kehidupan pada masa kehamilan hingga usia dua tahun, kurangnya pengetahuan tentang pola asuh yang baik, serta sanitasi lingkungan yang buruk. Rahman et al., (2024)

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting menyatakan bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh asupan gizi yang buruk dan paparan infeksi berulang. Kondisi ini ditandai dengan tinggi atau panjang badan anak yang lebih rendah dari standar pertumbuhan Kementerian Kesehatan. Secara teknis, stunting adalah masalah tumbuh kembang yang menghambat anak mencapai tinggi badan yang ideal untuk usianya. Jika nilai z-score tinggi badan menurut usia berada di bawah -2,00 Standar Deviasi (SD) dan jika nilainya berada di bawah -3,00 SD anak tersebut dikategorikan stunting. Tidak hanya dampaknya berdampak pada perkembangan kognitif mereka dan produktivitas mereka tetapi juga berdampak pada berbagai aspek jangka pendek dan jangka panjang.

Pada tahun 2017 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Indonesia membuat Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting (RAN PASTI) sebagai upaya strategis untuk mengurangi angka stunting. Tujuan program adalah untuk mengurangi prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024. Upaya ini difokuskan pada intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, terutama selama periode

1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak masa kehamilan hingga anak-anak berusia dua tahun serta berlanjut hingga usia enam tahun. Supriyanto & Rahman, (2023)

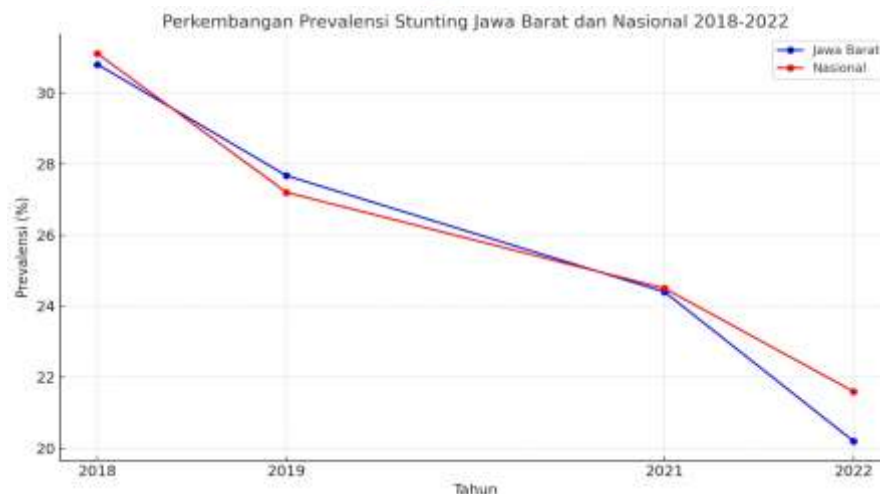
Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting (RAN PASTI) memainkan peran dalam penanganan stunting di Indonesia. Program ini memposisikan stunting sebagai isu serius yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia dan potensi pertumbuhan nasional. Jika tidak ditangani stunting dapat menghambat pembangunan nasional dalam jangka, baik dari aspek kesehatan pendidikan maupun ekonomi. Tujuan utama RAN PASTI adalah untuk mendukung strategi nasional dalam percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai pendekatan yang terintegrasi. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: 1) Menurunkan prevalensi stunting; 2) Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; 3) Memastikan pemenuhan kebutuhan gizi; 4) Memperbaiki pola asuh; 5) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan; dan 6) Meningkatkan akses minum dan sanitasi yang layak. Pratama et al., (2023)

Berdasarkan hasil survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 prevalensi angka stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di 2022. Target Pemerintah untuk penurunan prevalensi stunting adalah 14% di tahun 2024, untuk mengejar penurunan stunting hingga 14% artinya harus turun 3,8% selama 2 tahun berturut-turut (Rokom, 2023)

Target penurunan prevalensi stunting sebesar 14 %, pada tahun 2024 terus di kejar melalui berbagai upaya strategis. Pemerintah, melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diberikan mandat untuk merancang sebuah rencana komprehensif yang fokus pada percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Hasil dari upaya tersebut diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan

Penurunan Angka Stunting (RAN PASTI), yang menjadi pedoman utama dalam implementasi kebijakan di tingkat nasional maupun daerah.

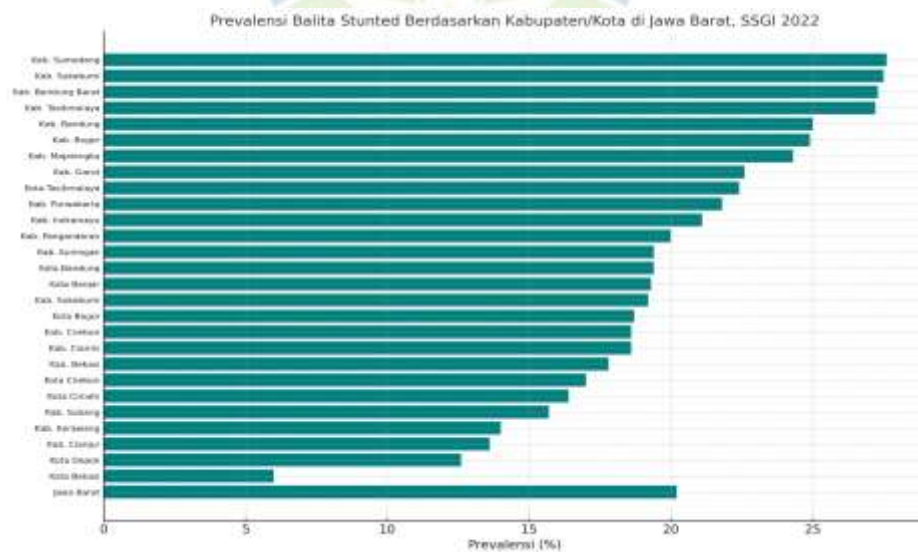
RAN PASTI dirancang sebagai kerangka kerja terpadu yang memberikan arahan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam menyusun strategi lokal untuk menurunkan prevalensi stunting. Dokumen ini mencakup langkah-langkah sistematis, mulai dari intervensi spesifik hingga pendekatan gizi sensitif, guna memastikan bahwa program-program yang dijalankan tepat sasaran. Dengan adanya RAN PASTI, pemerintah daerah memiliki acuan yang jelas dalam merancang kebijakan dan program yang efektif serta berkelanjutan, sehingga percepatan penurunan angka stunting dapat berjalan lebih terarah dan memberikan hasil nyata bagi peningkatan kualitas hidup generasi penerus bangsa. Kementrian & Koordinator (2024) Jawa barat termasuk ke dalam 5 provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak. Selain itu, pada Tahun 2023 seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat telah ditetapkan sebagai kabupaten/kota lokus prioritas percepatan penurunan stunting.



Gambar 4. 1 Perkembangan Prevalensi Stunting Jawa Barat dan Nasional 2018 – 2022

Sumber: Buku Saku SSGI 2022

Berdasarkan laporan dari puskesmas di Kabupaten Bandung prevalensi balita stunting di Provinsi Jawa Barat telah menurun secara dan konsisten dan telah menurun 10,9%. Prevalensi balita stunting Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2022 mencapai 20,2% dan melampaui Target RPJMD Provinsi Jawa Barat di angka 21,2%. Angka ini pun sudah berada di bawah angka Nasional 21,6% meski masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar untuk mencapai target 14% di Tahun 2024. Pada Tahun 2023, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan target 19,2% sebagai target akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat. dan dalam pelaksanaan Survey Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 diharapkan target tersebut dapat terwujud sebagai hasil konvergensi seluruh stakeholder pembangunan di Jawa Barat dalam menurunkan angka stunting.



Gambar 4. 2 (Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Bandung)

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia (TNP2K) merilis bahwa terdapat 100 Kabupaten/Kota prioritas dalam penanganan stunting di Indonesia, termasuk Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemenkes RI melalui SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) Kabupaten Bandung menjadi salah satu kabupaten dengan kasus prevalensi tertinggi ke-5 se-provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 dengan tingkat prevalensi stunting sebesar 25%

Bupati Kabupaten Bandung berkomitmen untuk menurunkan angka stunting hingga di bawah 14 persen. Penurunan angka stunting ini menjadi prioritas utama karena data terbaru menunjukkan bahwa tingkat stunting di wilayah ini masih tergolong tinggi. Langkah ini diharapkan tidak hanya akan menurunkan angka stunting, tetapi juga memperkuat kesehatan anak-anak di Kabupaten Bandung, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih sehat, cerdas, dan mampu berkontribusi secara produktif di masa depan.

Tabel 1. 1 Pola Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Bandung Tahun 2018 - 2024

Penyebab Kematian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Afiksia	45	36	34	43	43
BBLR	98	43	45	88	138
TN	2	0	0	0	0
Infeksi	0	0	0	0	0
Kecacatan	18	13	17	16	19
Ikterus	1	0	0	0	0
Sepsis	8	1	3	1	4
Hipotermi	0	0	0	0	0
Pneumonia	2	4	4	5	11
Diare	1	4	4	9	5
Sebab lain	29	116	49	19	31
Total	204	217	146	196	251
Lahir mati	77	90	72	115	94

Sumber : Buku Saku Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022

Berdasarkan yang tersedia, kematian bayi paling banyak disebabkan oleh bayi berat lahir rendah (BBLR), asfiksia dan kecacatan. BBLR merupakan kondisi dimana bayi lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram

tanpa memandang usia kehamilan, yang ditimbang dalam dalam sat jam seleah lahir. Kondisi ini sering kali disertai komplikasi seperti hipotzermia, hipoglikemia, hiperbilirubinemia, infeksi atau sepsis, dan gangguan minum yang semua dapat meningkatkan risiko kematian. Faktor BBLR meliputi berbagai aspek, seperti faktor ibu yang mencakup usia terlalu muda atau terlalu tua , penyakit kehamilan, malnutrisi, trauma kelelahan, kebiasaan buruk seperti merokok, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu faktor plasenta seperti gangguan pembuluh darah dan kehamilan ganda serta faktor janin seperti kelainan kongenital dan infeksi juga turut berkontribusi.

Penyebab utama kematian bayi berdasarkan data di atas terkait erat dengan stunting pada anak. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah memiliki risiko tinggi mengalami gangguan pertumbuhan sejak dini karena kondisi ini seringkali disertai dengan komplikasi serta hipotermia, infeksi dan maslah makan. Status gizi anak selama 1.000 hari pertama kehidupan, yang sangat penting untuk mencegah stunting, dipengaruhi oleh penyebab BBLR seperti malnutrisi ibu, penyakit kehamilan, dan kebiasaan buruk seperti merokok. Bayi dengan BBLR yang tidak menerima intervensi gizi yang tepat memiliki kemungkinan lebih besar mengalami gagal tumbuh, meningkatkan kemungkinan stunting. Anak stunting akan mengalami konsekuensi serius dalam jangka panjang, seperti keterbatasan kognitif, kerentanan terhadap penyakit, dan produktivitas yang rendah.



Gambar 4. 3 (Cakupan Balita Umur 0-59 Bulan Yang Ditimbang Dengan Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, dan BB/TB di Kabupaten Bandung Tahun 2022)

Sumber : Buku Saku Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022

Berdasarkan data tersebut diketahui masih terdapat balita dengan masalah gizi seperti gizi kurang, tubuh sangat pendek, pendek, dan kurus. Dibandingkan dengan data di Jawa Barat masalah balita kurus di Kabupaten Bandung relatif lebih rendah. Namun masalah balita pendek dan sangat pendek masih menjadi pusat perhatian. Hal ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan gizi dan kesehatan balita untuk mencegah stunting dan mendukung pertumbuhan yang optimal.

Tabel 1. 2 Keadaan Status Gizi Balita di Kabupaten Bandung Tahun 2017 – 2022

Tahun	Gizi (%)					
	Normal (Gizi Baik)	Gemuk (Obesitas)	(Gizi Lebih)	(Risiko Gizi Lebih)	Kurus (Gizi Kurang)	Sangat Kurus (Gizi Buruk)
2017	94,59	4,03	-	-	1,33	0,04
2018	94,29	4,44	-	-	1,75	0,06
2019	94,26	4,17	-	-	1,51	0,05
2021	84,44	1,01	2,43	7,99	3,81	0,34
2022	84,82	0,99	2,24	7,93	3,70	0,33

Sumber : Buku Saku Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022

Berdasarkan data yang tersedia, menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung pada tahun 2017 menghadapimasalah gizi ganda, yaitu kekurangan gizai dan kelebihan gizi, dengan persentase kasus yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun, dari tahun 2019 hingga 2021, cakupan kasus gizi buruk dan kurang mulai menurun. Permenkes nomor 2 Tahun 2020 tentang standar Antropometri Anak yang berbeda dari ketentuan sebelumnya, mengubah standar pengukuran, sehingga data tahun 2020 tidak dapat dibandingkan secara menyeluruh. Beberapa faktor berkontribusi pada pningkatan tingkat gizi buruk dan gizi kurang di Kabupaten Bandung termasuk konsumsi makanan yang tidak seimbang, kurangnya pasokan makanan di tingkat rumah tangga, tingkat infeksi balita yang tinggi, dan kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi seimbang.

Penanganan stunting di Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui berbagai program yang terintegrasi, salah satunya adalah Peraturan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) No 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN

PASTI), yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Selain itu, pelaksanaan program ini diperkuat dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting. Kedua regulasi ini dirancang untuk mendukung program prioritas nasional dalam upaya penurunan angka stunting melalui pendekatan multisektor yang mengutamakan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah. Pendekatan tersebut dilakukan secara cepat, akurat, transparan, dan akuntabel.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tingginya angka stunting pada anak di bawah usia lima tahun, yang umumnya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis akibat pengaruh lingkungan yang kurang mendukung dan faktor keturunan. Program ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam meningkatkan status gizi anak, memperbaiki pola asuh, serta memperkuat kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, penanganan ini juga difokuskan pada peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Dengan implementasi yang tepat, diharapkan status gizi masyarakat dapat meningkat, sekaligus mendorong kualitas sumber daya manusia yang lebih baik di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Bandung, melalui Dinas Kesehatan yang memiliki peran sentral dalam pelayanan kesehatan, memegang tanggung jawab besar dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan strategis untuk menurunkan angka stunting di wilayah tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, Dinas Kesehatan menerapkan berbagai strategi yang komprehensif dan terintegrasi, yang meliputi perencanaan program yang matang, optimalisasi penggunaan sumber daya, dan penguatan organisasi yang melibatkan kolaborasi lintas sektor. Langkah-langkah ini bertujuan guna memastikan bahwa setiap program-program terkait penurunan stunting dijalankan secara efektif dan efisien, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya di lapangan. Optimalisasi sumber daya mencakup pemanfaatan tenaga kesehatan yang kompeten, peningkatan fasilitas kesehatan, dan dukungan anggaran yang memadai. Selain itu, kerja sama

dengan sektor-sektor lain, seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi, juga diperkuat agar dampak dari setiap program penurunan stunting dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Melalui upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap mampu menurunkan angka stunting secara signifikan, sehingga generasi mendatang dapat tumbuh dengan sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan yang lebih baik.

Sejalan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2019 tentang percepatan penurunan dan pencegahan stunting. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung memiliki kewajiban dalam menyusun dan melaksanakan program-program yang relevan dalam menanggulangi masalah stunting melalui peningkatan layanan kesehatan serta inisiatif pencegahan yang komprehensif. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat, lembaga kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai target penurunan angka stunting sesuai komitmen pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lusi Dwi Syahrani dengan judul "Faktor Risiko Stunting pada Balita Usia 1-5 Tahun" di Kabupaten Bandung, ditemukan beberapa faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi stunting. Salah satunya adalah nutrisi yang tidak adekuat selama masa prenatal, di mana ibu hamil tidak memperoleh asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan janin secara optimal. Selain itu, terdapat kasus tidak diberikan ASI eksklusif, yang disebabkan oleh ketidakmampuan ibu untuk memproduksi ASI secara memadai. Faktor lainnya adalah pola pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang kurang bervariasi. Sebagian besar anak hanya diberi MPASI instan dengan jenis yang sama secara berulang, sehingga kebutuhan gizi mereka tidak sepenuhnya terpenuhi. Riwayat penyakit pada balita, seperti demam, batuk, pilek, dan diare, juga menjadi penyebab signifikan karena kondisi tersebut dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, riwayat imunisasi yang tidak lengkap

memperburuk situasi, karena balita menjadi lebih rentan terhadap penyakit yang dapat memengaruhi tumbuh kembangnya. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya intervensi terpadu untuk mencegah stunting, mulai dari edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya nutrisi selama kehamilan, mendorong pemberian ASI eksklusif, hingga penyediaan MPASI yang bergizi dan bervariasi. Selain itu, peningkatan akses layanan kesehatan, termasuk imunisasi lengkap dan penanganan penyakit pada balita, juga perlu diperkuat untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan sehat dan optimal.

Melalui implementasi kebijakan yang komprehensif dan berbasis bukti, upaya pencegahan stunting dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan efektif. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, seperti intervensi gizi yang tepat sasaran, edukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan perilaku hidup bersih, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang merata, terutama bagi kelompok rentan. Dalam hal ini, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk memastikan program-program yang dirancang dapat berjalan berkelanjutan serta mengatasi berbagai hambatan implementasi di tingkat masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang berkontribusi terhadap stunting di Kabupaten Bandung, termasuk faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab dan solusi stunting, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penguatan kebijakan yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan lokal. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, tetapi juga untuk menciptakan generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Generasi yang berkualitas tersebut nantinya diharapkan mampu mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa di masa depan.

Berdasarkan penelitian awal di lapangan ditemukan bahwa kurangnya sosialisasi, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan yang menjadi hambatan dalam penurunan stunting dan sarana pendukung, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena permasalahan implementasi kebijakan terkait stunting

Teori Edward III dalam Widodo, (2017) sejalan dengan permasalahan yang ada di latar belakang untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung dalam mengatasi masalah stunting di daerah tersebut. Penelitian ini akan mengambil judul: **“Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bandung”**

B. Indifikasi Masalah

1. Masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap program penurunan stunting.
2. Terbatasnya sumberdaya terutama dari segi fasilitas di lapangan, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung lapangan akan mempengaruhi keberhasilan program penurunan stunting.
3. Masih kurangnya pemahaman, komitmen dalam pengimplementasian yang berdampak pada rendahnya efektifitas intervensi dan capaian target penurunan stunting
4. Struktur birokrasi yang cenderung kaku dan berjenjang dan koordinasi lintas sektor yang kurang optimal, hal ini menghambat sinkronisasi program serta integritas data dan kegiatan di lapangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasar indentifikasi masalah yang penulis urang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi dalam implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Bandung?

2. Bagaimana sumber daya dalam implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana Disposisi/sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui komunikasi dalam implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui sumber daya dalam implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui disposisi/sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis

Bagi institusi pendidikan terutama di lingkungan Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung diharapkan tulisan ini dapat menjadi sumber referensi serta bahan telaah akademis yang mendalam dalam penyajian masalah penanggulangan prevalensi stunting. Selain itu, karya ini juga diharapkan mampu menjadi panduan yang komprehensif bagi peneliti lain, khususnya dari kalangan akademisi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai upaya-upaya penanggulangan stunting, baik dari segi metodologi, kebijakan, maupun implementasi program di lapangan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan

kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus mendukung program-program penanggulangan stunting di Indonesia.

2. Secara praktis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan yang sedang diteliti, dan pengetahuan dalam bidang administrasi publik, serta dapat mengaplikasikan dan menerapkan pengetahuan yang peneliti pelajari, dapat dijadikan bahan dalam mengembangkan dan memperluas penelitian lebih lanjut.

Melalui dari penelitian ini diharapkan menjadi pedoman pemerintah untuk mengkaji lebih dalam masalah penanggulangan stunting, serta bisa dijadikan bahan referensi dalam menanggulangi stunting di Kabupaten Bandung.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini membahas mengenai implmentasi kebijakan percepatan pencegahan penanggulangan stunting di kabupaten bandung Dalam konteks ini, administrasi memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Menurut Pasolong, (2013) administrasi adalah suatu pekerjaan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh sekelompok individu yang bekerja sama secara efektif, efisien, dan rasional untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sejalan dengan sifat implementasi kebijakan publik, yang harus terstruktur dan dikelola dengan baik agar berjalan sesuai dengan rencana.

Kebijaka Publik menurut Andreson dalam Widodo, (2017) memiliki beberapa karakteristik penting yang mendasari implementasinya. Pertama, kebijakan selalu memiliki tujuan yang jelas atau berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan, yang menjadi landasan bagi setiap tindakan atau keputusan yang diambil. Kedua, kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, mencakup langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan publik. Ketiga, kebijakan publik bukan hanya tentang rencana

atau niat pemerintah, melainkan tentang apa yang nyata-nyata dilakukan oleh pemerintah, yakni tindakan yang benar-benar terealisasi di lapangan, bukan sekadar yang direncanakan. Keempat, kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negatif. Kebijakan positif mencakup tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah tertentu, sedangkan kebijakan negatif merujuk pada keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, yang juga merupakan bagian dari kebijakan yang dipertimbangkan. Terakhir, kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat memaksa, yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, memastikan bahwa tindakan pemerintah memiliki kekuatan hukum dan kewajiban untuk dipatuhi oleh seluruh pihak terkait.

Mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III mengidentifikasi empat faktor kunci yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi tersebut. Faktor-faktor ini mencakup berbagai elemen yang saling berinteraksi dalam memastikan kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien yaitu:

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan yang sukses sangat bergantung pada komunikasi yang jelas dan efektif. Pembuat keputusan perlu memahami dengan baik apa yang perlu dilakukan, dan komunikasi yang lancar antar semua pihak terkait baik pembuat kebijakan, pelaksana, maupun masyarakat akan memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai. Tanpa komunikasi yang baik, risiko ketidaksesuaian antara niat kebijakan dan implementasinya menjadi lebih besar.

2. Sumber Daya

Tidak peduli seberapa jelas dan tujuannya, implementasi kebijakan tidak akan efektif jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan dan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif.

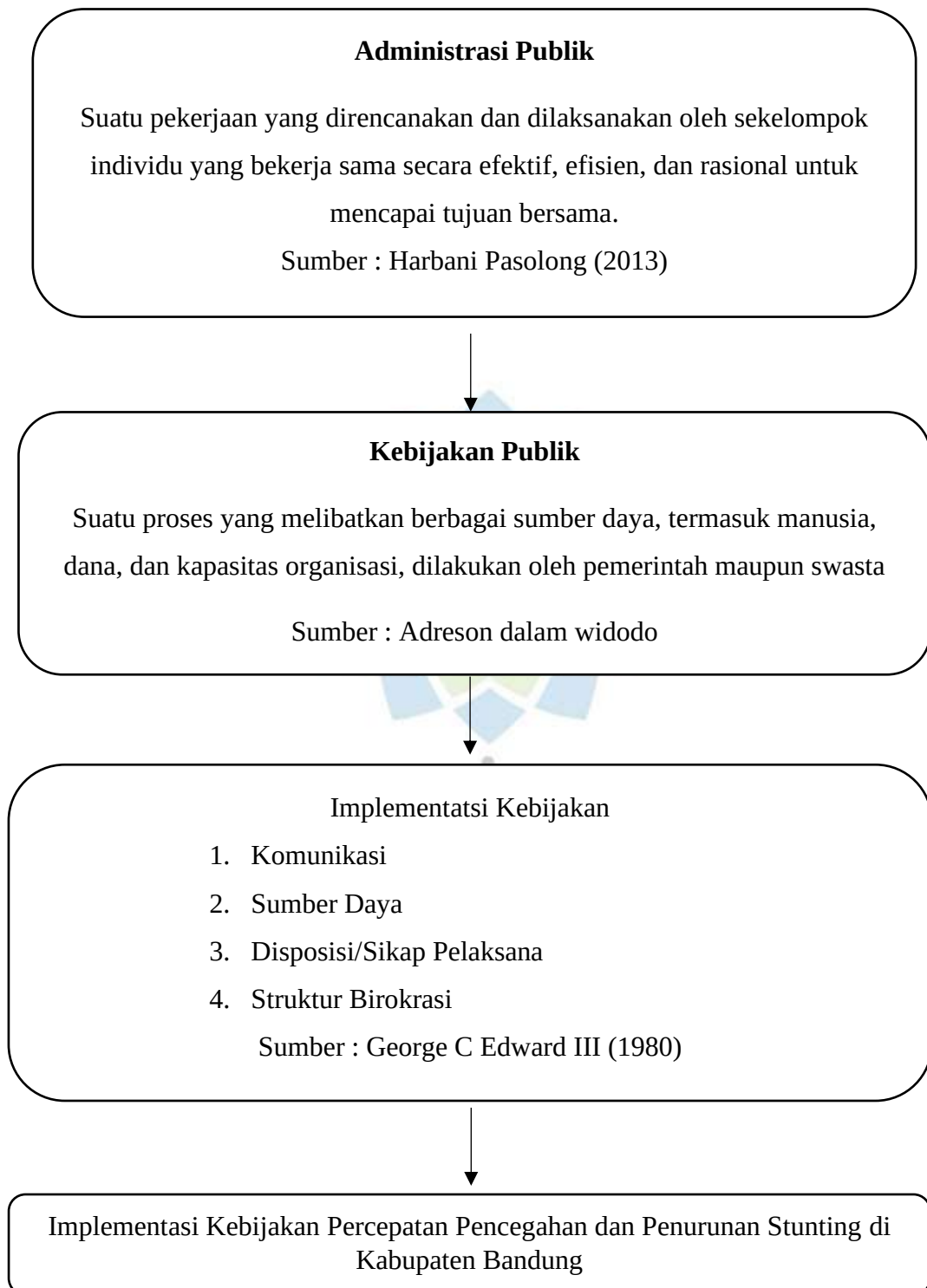
3. Disposisi/sikap pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sikap pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan untuk melakukan kemampuan untuk melakukan tugas tugas tersebut dengan baik, bukan hanya mengetahui apa yang harus dilakukan. Hal ini mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kemauan untuk melaksanakan kebijakan secara konsisten tanpa adanya bias atau penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang kompleks memerlukan kerja sama antara berbagai pihak dan tingkatan dalam birokrasi. Jika struktur birokrasi tidak mendukung atau tidak kondusif, maka sumber daya yang ada tidak akan digunakan secara maksimal, dan proses implementasi akan terhambat. Koordinasi antar berbagai level pemerintahan serta antara berbagai instansi sangat penting untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan dengan efektif. Struktur birokrasi yang fleksibel dan mendukung sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dalam pelaksanaan kebijakan.

Keempat faktor ini saling terkait dan membentuk suatu sistem yang menentukan apakah kebijakan dapat diterapkan dengan baik maupun tidak. Oleh sebab itu, kebijakan publik yang efektif memerlukan perhatian terhadap komunikasi yang baik, mengalokasikan sumber daya yang memadai, kemampuan pelaksana yang tinggi, dan struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.



Gambar 1.1

Pradigma Berpikir Tentang Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting

Sumber : Diolah oleh peneliti (2024)